

BAB VII BIDANG EKONOMI

7.1. UMUM

Sejak timbulnya krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, pertumbuhan ekonomi nyaris terhenti dan laju inflasi meningkat pesat. Akibatnya pendapatan dan taraf hidup masyarakat merosot tajam dimana jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran meningkat dengan tajam. Krisis ekonomi telah mengangkat permukaan beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan perekonomian baik pada tingkat nasional maupun regional.

Sementara itu, ke depan, pembangunan ekonomi khususnya di Propinsi DKI Jakarta akan menghadapi dua tantangan utama yaitu yang terkait dengan isu globalisasi atau perdagangan bebas, dan isu desentralisasi. Pengalaman membangun pada masa lalu yang bermuara pada krisis yang berkepanjangan dapat digunakan sebagai pelajaran berharga dalam membangun Propinsi DKI Jakarta ke depan. Secara normatif, untuk membangun perekonomian yang kuat, sehat dan berkeadilan, pembangunan ekonomi harus dilaksanakan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat berdasarkan aturan main yang jelas, etika dan moral yang baik, nilai-nilai yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta persamaan derajat, hak, dan kewajiban warga negara, termasuk kesetaraan dan keadilan jender.

Wujud perekonomian Propinsi DKI Jakarta ke depan harus mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan melalui partisipasi masyarakat secara luas namun tetap mempertimbangkan pencapaian daya saing, efektivitas dan efisiensi serta daya dukung lingkungan untuk kehidupan yang berkelanjutan.

Di bidang ekonomi terdapat 6 fungsi, yaitu 1) pariwisata, 2) industri dan perdagangan, 3) investasi dan pengembangan usaha daerah, 4) UKM dan koperasi, 5) peternakan, perikanan dan kelautan, 6) pertanian dan kehutanan.

Kondisi dan Permasalahan

Pariwisata

1. Citra atau dampak dari persepsi wisatawan mancanegara (wisman) yang menempatkan Jakarta sebagai kota yang kurang kondusif, aman dan nyaman untuk berwisata
2. Produk unggulan yang kurang berkembang, misalnya penataan ruang kota Jakarta antara lain pemanfaatan Kota Tua yang belum optimal untuk objek wisata
3. Kemampuan SDM di bidang industri pariwisata yang kurang memadai, kurangnya aksesibilitas obyek pariwisata, standar pelayanan yang belum optimal, belum memadainya sarana dan prasarana obyek wisata dan kurangnya apresiasi, partisipasi serta pemahaman masyarakat tentang kepariwisataan
4. Promosi pariwisata lintas sektoral yang masih kurang efektif dan efisien

Industri dan Perdagangan

Ada beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan pembangunan industri di Propinsi DKI Jakarta dalam menghadapi era perdagangan global dan otonomi daerah, yaitu :

1. Masih lemahnya daya saing industri karena belum didukung basis kegiatan produksi, perdagangan dan jaringan distribusi yang kuat
2. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi sehingga peningkatan nilai tambah dan perluasan lapangan kerja belum tercapai dengan maksimal
3. Belum terciptanya jaringan distribusi industri dan perdagangan yang mampu menjamin ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dan harga yang bersaing
4. Belum luasnya diversifikasi pasar ekspor dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi

5. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dalam rangka mengantisipasi pasar global

Pengembangan Usaha Daerah

1. Belum optimalnya penataan dan restrukturisasi Usaha Daerah (PD/BUMD/PT Patungan) dalam memperbaiki kinerjanya sehingga dapat lebih efisien dan produktif.
2. Masih perlu ditingkatkannya informasi penanaman modal serta peningkatan pelayanan investasi khususnya pelayanan perijinan daerah
3. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah yang diarahkan untuk pelayanan kepada publik
4. Belum optimalnya produktivitas usaha daerah dalam kaitannya dengan kontribusi pada PAD

Usaha Kecil, Menengah (UKM) dan Koperasi

1. Permasalahan tentang pedagang kaki lima yang belum tertib dan tertata
2. Rendahnya akses pemasaran, daya saing, kualitas produk UKM yang belum kompetitif dan rendahnya kualitas SDM yang mempunyai jiwa kewirausahaan yang tangguh
3. Lemahnya akses permodalan dan juga akses kemitraan dengan pengusaha besar
4. Belum optimalnya pemanfaatan skema permodalan dan pengembangan usaha melalui Lembaga Keuangan Mikro serta penyertaan modal melalui skema modal ventura dan dana bergulir

Peternakan, Perikanan dan Kelautan

1. Belum optimalnya penataan jaringan distribusi peternakan dan perikanan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta sehingga terjadi fluktuasi harga untuk produk hasil ternak dan perikanan
2. Kurangnya usaha pengembangan produk peternakan dan perikanan yang ramah lingkungan melalui diversifikasi, peningkatan kualitas produk, akses

teknologi dan akses permodalan, serta kualitas SDM yang dapat meningkatkan daya saing produk

3. Masih kurangnya sarana penangkapan ikan dan budidaya ikan
4. Belum dimanfaatkannya benda-benda berharga atau muatan kapal tenggelam (penanganan harta karun)

Pertanian dan Kehutanan

1. Lemahnya ketahanan pangan (supply belum memadai)
2. Perlunya penataan kembali jalur distribusi hasil pertanian dan kehutanan, termasuk sistem tata niaga
3. Adanya ketergantungan kebutuhan komoditas pertanian dan hasil hutan dari luar Propinsi DKI Jakarta
4. Belum adanya standardisasi mutu komoditas pertanian dan hasil hutan, termasuk perlu adanya ketentuan dan peraturan mengenai pengawasan peredaran produk pertanian dan hasil hutan
5. Belum optimalnya penghijauan wilayah Propinsi DKI Jakarta yang mendukung penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
6. Masih lemahnya perlindungan konsumen terhadap bahaya pestisida dan zat-zat berbahaya lainnya terkait dengan penggunaan komoditas pertanian dan hasil hutan
7. Masih lemahnya jaringan kemitraan di bidang agribisnis
8. Belum optimalnya SDM petugas yang memberikan penyuluhan dan pengawasan
9. Belum optimalnya penerapan teknologi di bidang pertanian dan kehutanan

7.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan di bidang ekonomi adalah sebagai berikut:

Pariwisata

Menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber potensial dalam penciptaan pendapatan masyarakat, penyerapan lapangan kerja dan penerimaan daerah serta wahana pelestarian sumber daya pariwisata potensial yang menjadi andalan perekonomian Propinsi DKI Jakarta.

Industri dan Perdagangan

Menjadikan usaha industri yang sehat, berteknologi tepat guna, mandiri dan tahan terhadap globalisasi, ramah lingkungan dalam suatu kawasan industri yang mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya termasuk investasi serta meningkatkan ekspor. Sedangkan untuk perdagangan, menciptakan sistem perdagangan yang sehat dan efisien, adil dan dinamis bagi semua skala usaha, serta mengembangkan jaringan distribusi produk industri dan perdagangan.

Pengembangan Usaha Daerah

Meningkatkan profesionalisme dan kinerja pengelolaan usaha daerah sehingga mampu tumbuh, berkembang dan bersaing secara sehat di era globalisasi serta menjadi sumber penerimaan daerah. Disamping itu perlu meningkatkan iklim kondusif bagi berkembangnya investasi dan usaha-usaha swasta secara lebih efektif, efisien dan produktif.

Usaha Kecil, Menengah (UKM) dan Koperasi

Mendorong berkembangnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang sehat, dinamis serta mengurangi hambatan usaha sehingga UKM dapat menjadi pilar perekonomian Jakarta dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan ekspor. Sedangkan untuk koperasi, mendorong tumbuhnya koperasi serba usaha yang secara nyata dibutuhkan masyarakat, dan memperluas jaringan sehingga mampu

mengisi mata rantai kegiatan ekonomi yang dijalankan masyarakat, serta menjadikan koperasi sebagai gerakan masyarakat.

Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Mengembangkan sistem distribusi produk peternakan yang dapat menjamin penyediaan gizi bagi masyarakat Jakarta dengan harga terjangkau serta sesuai standar kesehatan yang ditentukan. Sedangkan untuk perikanan dan kelautan mendorong perkembangan usaha perikanan yang lebih efisien, produktif dan bernilai tambah tinggi, serta mengurangi berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi nelayan.

Pertanian dan Kehutanan

Menciptakan pola pertanian perkotaan pada lahan sempit yang efektif, produktif, bermutu dan bernilai tambah tinggi dengan model padat teknologi, serta menambah ketersediaan pangan dan gizi masyarakat dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau. Sedangkan untuk kehutanan, meningkatkan pengendalian penggunaan/konsumsi kayu dan produk hutan serta memperluas hutan kota dan hutan lindung untuk kesinambungan ekosistem perkotaan.

7.3. STRATEGI BIDANG EKONOMI

Strategi yang mendukung pembangunan ekonomi di Propinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

Pariwisata

Mengembangkan pariwisata secara terpadu melalui pengembangan produk pariwisata, perluasan pasar pariwisata, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata (travel biro, komunikasi, listrik, air bersih, hotel, restoran dan wisata minat khusus) serta pemulihan citra pariwisata Jakarta sebagai daerah wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi sehingga dapat bersaing secara sehat di era pasar terbuka.

Industri dan perdagangan

Menata basis industri dan perdagangan secara terpadu dan sinergis dengan mengoptimalkan keunggulan komparatif yang dimiliki Jakarta dan berbasis sumber daya lokal khususnya industri yang berorientasi ekspor dengan mutu internasional guna meningkatkan daya saing produk industri dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan, mengembangkan jaringan distribusi produk industri dan perdagangan yang kokoh dan tangguh demi menjamin kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat dan menciptakan jaringan perdagangan dengan daerah lain dan dengan luar negeri untuk menjawab tantangan persaingan global.

Pengembangan Usaha Daerah

Mengoptimalkan penataan dan restrukturisasi Usaha Daerah (PD/BUMD/PT Patungan) dalam rangka memperbaiki kinerja dan profesionalisme pengelolaan usaha daerah sehingga menjadi lebih efektif, efisien dan produktif serta mampu bersaing secara sehat di era globalisasi. Meningkatkan kualitas dan informasi pelayanan investasi disertai dengan iklim investasi yang kondusif sehingga swasta mampu berkembang dalam era pasar bebas, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Usaha Kecil, Menengah (UKM) dan Koperasi

Mengoptimalkan peran UKM dan koperasi melalui peningkatan profesionalisme SDM yang mempunyai jiwa kewirausahaan, keterampilan manajemen usaha dan permodalan, memperluas akses pasar dan kualitas produk UKM dengan melakukan kemitraan dengan pengusaha besar, serta pengembangan usaha UKM dan koperasi melalui Lembaga Keuangan Mikro. Disamping itu juga melakukan penataan pedagang kaki lima dan usaha skala mikro dalam upaya menjadikan kota Jakarta tertib dan nyaman

Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Mengembangkan produk peternakan dan perikanan yang bernilai tambah tinggi melalui usaha diversifikasi, peningkatan kualitas produk, kualitas SDM serta permodalan, mengoptimalkan penataan jaringan distribusi peternakan dan perikanan dalam upaya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Jakarta dengan harga yang terjangkau serta mengembangkan budidaya peternakan dengan model perkotaan yang berlahan sempit serta tidak mengganggu lingkungan. Selain itu meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut (khususnya budidaya, wisata bahari dan penangkapan)

Pertanian dan Kehutanan

Mengembangkan produk pertanian berlahan sempit yang padat teknologi yang dapat berfungsi sebagai penyangga/reservasi lingkungan perkotaan dan ekosistemnya, memperlancar jalur distribusi produk pertanian dan kehutanan dari produsen ke konsumen sehingga harga produk tersebut dapat dikendalikan serta menerapkan standarisasi mutu komoditas pertanian dan hasil hutan termasuk pengawasan peredaran produk pertanian dan hasil hutan. Selain itu meningkatkan fungsi hutan kota sebagai hutan wisata, hutan lindung dan hutan cagar alam dengan upaya memperluas Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk keindahan kota dan paru-paru kota dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

7.4. MATRIKS BIDANG EKONOMI

Arah Kebijakan	Strategi	Program	Indikator Kinerja
Pariwisata			
Menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber potensial dalam penciptaan pendapatan masyarakat, penyerapan lapangan kerja dan penerimaan daerah serta wahana pelestarian sumber daya pariwisata potensial yang menjadi andalan perekonomian Propinsi DKI Jakarta.	Mengembangkan pariwisata secara terpadu melalui pengembangan produk pariwisata, perluasan pasar pariwisata, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata (travel biro, komunikasi, listrik, air bersih, hotel, restoran dan wisata minat khusus) serta pemulihan citra pariwisata Jakarta sebagai daerah wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi sehingga dapat bersaing secara sehat di era pasar terbuka.	<p>1. Pengembangan Produk Pariwisata</p> <p>2. Pengembangan Pasar Pariwisata</p> <p>3. Program Pengembangan Sarana dan Pelayanan Pariwisata</p>	<p>a) Terwujudnya kegiatan pariwisata sebagai wahana berkreasi di bidang kesenian dan kebudayaan</p> <p>b) Tersedianya Master Plan kebijakan sektor pariwisata DKI Jakarta</p> <p>c) Meningkatnya jumlah serta kualitas produk/obyek wisata</p> <p>d) Meningkatnya keterampilan dan kemampuan SDM Pariwisata</p> <p>a) Tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk buletin, brosur, video serta media internet</p> <p>b) Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara</p> <p>c) Meningkatnya jumlah devisa sektor pariwisata</p> <p>d) Meningkatnya peran pariwisata dalam PDRB</p> <p>e) Meningkatnya peranan pariwisata dalam penyerapan tenaga kerja</p> <p>a) Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata</p> <p>b) Meningkatnya pelayanan yang bermutu menurut standar internasional di kepariwisataan</p> <p>c) Berkembangnya sarana pendukung pariwisata, seperti travel agent, restoran dan lain-lain</p>

Arah Kebijakan	Strategi	Program	Indikator Kinerja
Industri dan Perdagangan			
<p>Menjadikan usaha industri yang sehat, berteknologi tepat guna, mandiri dan tahan terhadap globalisasi, ramah lingkungan dalam suatu kawasan industri yang mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya termasuk investasi serta meningkatkan ekspor. Sedangkan untuk perdagangan, menciptakan sistem perdagangan yang sehat dan efisien, adil dan dinamis bagi semua skala usaha, serta mengembangkan jaringan distribusi produk industri dan perdagangan.</p>	<p>Menata basis industri dan perdagangan secara terpadu dan sinergis dengan mengoptimalkan keunggulan komparatif yang dimiliki Jakarta dan berbasis sumber daya lokal khususnya industri yang berorientasi ekspor dengan mutu internasional guna meningkatkan daya saing produk industri dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan, mengembangkan jaringan distribusi produk industri dan perdagangan yang kokoh dan tangguh demi menjamin kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat dan menciptakan jaringan perdagangan dengan daerah lain dan dengan luar negeri untuk menjawab tantangan persaingan global.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan dan Penguatan Basis Industri dan Perdagangan 2. Penataan dan Pengembangan Produk Industri dan Perdagangan 	<ol style="list-style-type: none"> a) Meningkatnya nilai tambah sektor industri dan perdagangan b) Makin kokohnya pengembangan kawasan industri berbasis sumber daya manusia dan sumber daya potensial lainnya c) Meningkatnya keragaman basis produksi dan distribusi yang berdaya saing global d) Meningkatnya usaha industri yang ramah lingkungan e) Terciptanya struktur usaha perdagangan yang lebih sehat f) Terwujudnya mekanisme pasar yang kuat g) Terwujudnya pelayanan prima sesuai standar internasional a) Meningkatnya kualitas produk industri dan perdagangan b) Meningkatnya keanekaragaman produk industri c) Meningkatnya pasar produk industri dan jaringan distribusinya d) Meningkatnya penggunaan teknologi industri yang ramah lingkungan e) Meningkatnya partisipasi masyarakat, UKM dan investasi swasta dalam pengembangan industri dan perdagangan f) Terciptanya sistem usaha industri yang saling mendukung antara industri hulu dan industri hilir g) Meningkatnya kualitas industri kecil dan menengah melalui pengembangan sentra-sentra industri h) Meningkatnya kualitas SDM industri dan perdagangan secara profesional dan handal

lanjutan...

Arah Kebijakan	Strategi	Program	Indikator Kinerja
		3. Penataan Jaringan Distribusi Produk Industri dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a) Terselenggaranya jaringan dan pemasaran produk industri yang seimbang dan proporsional, dengan partisipasi UKM yang lebih luas b) Terjaminnya ketersediaan dan kelancaran distribusi barang yang memenuhi kebutuhan masyarakat c) Terjaminnya kualitas barang yang dipasarkan d) Terwujudnya mata rantai kegiatan sektor perdagangan dan jasa yang sehat, efisien dan efektif e) Terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau f) Berkurangnya distorsi pada distribusi barang kebutuhan pokok h) Meningkatnya daya saing produk lokal di pasar dalam dan luar negeri
		4. Pengembangan Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatnya nilai ekspor non-migas b) Meningkatnya sumbangan ekspor terhadap perolehan devisa dan PDRB c) Meningkatnya peran aktif masyarakat dan UKM dalam pengembangan ekspor

Arah Kebijakan	Strategi	Program	Indikator Kinerja
Pengembangan Usaha Daerah			
<p>Meningkatkan profesionalisme dan kinerja pengelolaan usaha daerah sehingga mampu tumbuh, berkembang dan bersaing secara sehat di era globalisasi serta menjadi sumber penerimaan daerah. Disamping itu perlu meningkatkan iklim kondusif bagi berkembangnya investasi dan usaha-usaha swasta secara lebih efektif, efisien dan produktif.</p>	<p>Mengoptimalkan penataan dan restrukturisasi Usaha Daerah (PD/BUMD/PT Patungan) dalam rangka memperbaiki kinerja dan profesionalisme pengelolaan usaha daerah sehingga menjadi lebih efektif, efisien dan produktif serta mampu bersaing secara sehat di era globalisasi. Meningkatkan kualitas dan informasi pelayanan investasi disertai dengan iklim investasi yang kondusif sehingga swasta mampu berkembang dalam era pasar bebas, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melayani kebutuhan masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan dan Restrukturisasi Usaha Daerah (PD/BUMD/PT Patungan) 2. Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dan Usaha Swasta Lain 3. Pemberdayaan Aset Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> a) Terwujudnya PD/BUMD/PT Patungan yang sehat dan mandiri b) Meningkatnya kinerja PD/BUMD/PT Patungan c) Meningkatnya pendapatan daerah dari sumber PD/BUMD/PT Patungan d) Terwujudnya pengelolaan PD/BUMD/PT Patungan yang profesional, transparan dan akuntabel serta mampu bersaing di era globalisasi a) Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi di Propinsi DKI Jakarta yang memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat b) Terciptanya kemudahan dalam melakukan kegiatan investasi c) Terciptanya iklim investasi yang kondusif d) Meningkatnya efisiensi fungsi pelayanan usaha swasta e) Tersedianya pelayanan jasa sarana dan prasarana ekonomi bagi usaha swasta f) Terjaminnya gerak perekonomian sektor swasta dalam pemulihan ekonomi a) Meningkatnya jumlah aset daerah yang dimanfaatkan b) Meningkatnya PAD yang berasal dari pemanfaatan aset daerah c) Terpenuhinya pelayanan publik dari pemanfaatan aset yang <i>idle</i> d) Meningkatnya pengelolaan aset daerah dengan lebih fokus

Arah Kebijakan	Strategi	Program	Indikator Kinerja
<p>Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi</p> <p>Mendorong berkembangnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang sehat, dinamis serta mengurangi hambatan usaha sehingga UKM dapat menjadi pilar perekonomian Jakarta dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan ekspor. Sedangkan untuk koperasi, mendorong tumbuhnya koperasi serba usaha yang secara nyata dibutuhkan masyarakat, dan memperluas jaringan sehingga mampu mengisi mata rantai kegiatan ekonomi yang dijalankan masyarakat, serta menjadikan koperasi sebagai gerakan masyarakat.</p>	<p>Mengoptimalkan peran UKM dan koperasi melalui peningkatan profesionalisme SDM yang mempunyai jiwa kewirausahaan, keterampilan manajemen usaha dan permodalan, memperluas akses pasar dan kualitas produk UKM dengan melakukan kemitraan dengan pengusaha besar, serta pengembangan usaha UKM dan koperasi melalui Lembaga Keuangan Mikro. Disamping itu juga melakukan penataan pedagang kaki lima dan usaha skala mikro dalam upaya menjadikan kota Jakarta tertib dan nyaman</p>	<p>1. Penataan Kaki Lima dan Usaha Skala Mikro</p> <p>2. Pemberdayaan UKM dan Koperasi</p> <p>3. Pengembangan Kewirausahaan</p>	<p>a) Meningkatnya produktivitas usaha skala mikro</p> <p>b) Terciptanya usaha skala mikro yang sehat dan dinamis</p> <p>c) Meningkatnya ketahanan ekonomi DKI Jakarta</p> <p>d) Terwujudnya landasan bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, dengan peran usaha skala mikro yang berarti.</p> <p>e) Tertatanya para pedagang kaki lima ke lokasi binaan (lokbin)</p> <p>f) Tertibnya para pedagang kaki lima</p> <p>a) Meningkatnya jumlah dan skala usaha UKM</p> <p>b) Meningkatnya efisiensi dan produktivitas usaha skala kecil dan menengah</p> <p>c) Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan</p> <p>d) Meningkatnya akses UKM pada sumber daya produktif terutama permodalan dan pemasaran</p> <p>e) Berkurangnya beban biaya transaksi untuk mendorong daya saing UKM dan koperasi</p> <p>f) Meningkatnya jumlah koperasi dan anggota koperasi</p> <p>g) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas manajemen organisasi koperasi</p> <p>h) Meningkatnya peranan koperasi dalam perekonomian DKI Jakarta</p> <p>a) Meningkatnya pengetahuan serta sikap wirausaha dalam menjalankan usahanya</p> <p>b) Meningkatnya jumlah usaha yang produktif dan berwawasan</p> <p>c) Terciptanya lapangan kerja mandiri</p>

Lanjutan

Arah Kebijakan	Strategi	Program	Indikator Kinerja
		4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro	a) Meningkatnya jumlah lembaga keuangan mikro b) Terselenggaranya penerapan skema kredit usaha kecil yang mendorong akses usaha kecil, menengah dan mikro kepada sumber permodalan c) Tersosialisasinya skema kredit dan prosedur untuk mengakses sumber permodalan d) Semakin meratanya penyaluran dana kepada UKM dan koperasi e) Bertambahnya jumlah penerima modal usaha melalui lembaga keuangan mikro f) Tersedianya lembaga penjamin yang handal

Arah Kebijakan	Strategi	Program	Indikator Kinerja
Peternakan, Perikanan dan kelautan			
<p>Mendorong tumbuhnya model peternakan kota yang ramah lingkungan serta mengembangkan sistem distribusi produk peternakan yang dapat menjamin penyediaan gizi bagi masyarakat Jakarta dengan harga terjangkau serta sesuai standar kesehatan yang ditentukan. Sedangkan untuk perikanan dan kelautan mendorong perkembangan usaha perikanan yang lebih efisien, produktif dan bernilai tambah tinggi, serta mengurangi berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi nelayan</p>	<p>Mengembangkan produk peternakan dan perikanan yang bernilai tambah tinggi melalui usaha diversifikasi, peningkatan kualitas produk, kualitas SDM serta permodalan, mengoptimalkan penataan jaringan distribusi peternakan dan perikanan dalam upaya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Jakarta dengan harga yang terjangkau serta mengembangkan budidaya peternakan dengan model perkotaan yang berlahan sempit serta tidak mengganggu lingkungan. Selain itu meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut (khususnya budidaya, wisata bahari dan penangkapan)</p>	<p>1. Pengembangan Produksi Peternakan dan Perikanan</p> <p>2. Penataan Distribusi Hasil Peternakan dan Perikanan</p>	<p>a) Meningkatnya produksi peternakan unggulan terutama sapi perah dan unggas</p> <p>b) Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan masyarakat peternakan</p> <p>c) Meningkatnya kesehatan hewan ternak</p> <p>d) Terpeliharanya sumber daya lingkungan di lokasi peternakan</p> <p>e) Meningkatnya produksi perikanan darat dan laut</p> <p>f) Meningkatnya keanekaragaman produksi dan konsumsi ikan masyarakat</p> <p>g) Meningkatnya produksi dan keanekaragaman ikan hias</p> <p>h) Meningkatnya ekspor hasil produksi perikanan</p> <p>i) Meningkatnya pemanfaatan teknologi produksi perikanan dan pengolahannya</p> <p>j) Meningkatnya pendapatan masyarakat perikanan</p> <p>k) Meningkatnya produktivitas nelayan DKI Jakarta</p> <p>l) Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme nelayan, pembudidaya ikan dan peternak DKI Jakarta</p> <p>a) Terciptanya sistem distribusi dan pemasaran produk peternakan yang efisien dan efektif</p> <p>b) Meningkatnya kerjasama antar daerah dalam pengadaan dan penyaluran hewan ternak</p> <p>c) Terjaminnya ketersediaan dan kebutuhan gizi masyarakat yang bersumber dari produk peternakan yang memenuhi standar kesmavet</p> <p>d) Meningkatnya kualitas dan keamanan produk peternakan dan perikanan yang dipasarkan</p> <p>e) Terciptanya sistem distribusi hasil-hasil perikanan yang efektif dan efisien</p> <p>f) Terjaminnya ketersediaan kebutuhan gizi masyarakat yang berasal dari produk perikanan</p> <p>g) Meningkatnya kualitas, keamanan dan keanekaragaman produk yang dipasarkan</p>

Lanjutan

Arah Kebijakan	Strategi	Program	Indikator Kinerja
		3. Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut	a) Meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut untuk usaha produktif dan pariwisata b) Berkembangnya keanekaragaman usaha ekonomi kelautan non perikanan c) Terciptanya kelestarian sumber daya laut
Pertanian dan Kehutanan			
<p>Menciptakan pola pertanian perkotaan pada lahan sempit yang efektif, produktif, bermutu dan bernilai tambah tinggi dengan model padat teknologi, serta menambah ketersediaan pangan dan gizi masyarakat dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau. Sedangkan untuk kehutanan, meningkatkan pengendalian penggunaan/konsumsi kayu dan produk hutan serta memperluas hutan kota dan hutan lindung untuk kesinambungan ekosistem perkotaan</p>	<p>Mengembangkan produk pertanian berlahan sempit yang padat teknologi yang dapat berfungsi sebagai penyangga/reservasi lingkungan perkotaan dan ekosistemnya, memperlancar jalur distribusi produk pertanian dan kehutanan dari produsen ke konsumen sehingga harga produk tersebut dapat dikendalikan serta menerapkan standarisasi mutu komoditas pertanian dan hasil hutan termasuk pengawasan peredaran produk pertanian dan hasil hutan. Selain itu meningkatkan fungsi hutan kota sebagai hutan wisata, hutan lindung dan hutan cagar alam dengan upaya memperluas Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk keindahan kota dan paruparu kota dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)</p>	1. Pengembangan Produksi, Pemasaran Pertanian dan Kehutanan	a) Meningkatnya produksi hortikultura bernilai tinggi b) Meningkatnya produksi tanaman hias c) Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani d) Meningkatnya pemanfaatan lahan dan teknologi pertanian lahan sempit e) Terselenggaranya pengadaan, distribusi dan penyaluran bahan pangan yang efisien dan efektif f) Meningkatnya kualitas dan keanekaragaman pangan yang dikonsumsi g) Meningkatnya skor mutu pola pangan harapan h) Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengembangan agribisnis pertanian i) Terkendalinya pemasaran dan konsumsi kayu dan hasil hutan lainnya j) Meningkatnya kualitas kayu dan olahan hasil hutan lainnya yang dikonsumsi k) Berkurangnya pelanggaran perdagangan / penyelundupan hasil hutan l) Meningkatnya pengembangan agro wisata

Lanjutan...

Arah Kebijakan	Strategi	Program	Indikator Kinerja
		2. Pengembangan Hutan	a) Meningkatnya pengembangan ekowisata b) Meningkatnya rehabilitasi, reboisasi dan penghijauan c) Meningkatnya hutan kota dan usaha-usaha konservasi kawasan hutan (hutan lindung, cagar alam, suaka margasatwa dan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu) d) Meningkatnya ruang terbuka hijau (RTH) kehutanan e) Terciptanya keamanan hutan kota serta kawasan hutan (hutan lindung, cagar alam, suaka margasatwa dan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu) f) Meningkatnya peran serta/partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan penataan hutan kota, hutan lindung, cagar alam, suaka margasatwa dan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu g) Meningkatnya jumlah penangkaran satwa langka